

**PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM A)
DAN ADOPSI TEKNOLOGI KENTANG PADA PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP)**

(Studi Kasus di Kabupaten Solok, Sumatera Barat)

*Development of Micro Credit Institution for Agribusiness (MCI-A) and Adoption of Potato
technology in Rural Agribusiness Development PUAP Program
(Case Study in District of Solok, West Sumatera)*

Oleh:

Ade Supriatna

*Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor (16114), Jawa Barat*

Alamat korespondensi: Ade Supriatna (ade_supriatnas@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Dalam kondisi modal lemah, proses adopsi teknologi oleh petani akan berjalan kurang optimal dan terjadi beberapa komponen teknologi yang terbuang percuma (*idle*). Menyadari masalah tersebut, Kementerian pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di 33 Provinsi di Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan modal usaha berupa Bantuan Langsung Mandiri (BLM) sebanyak Rp.100 juta yang diberikan dan dikelola melalui Gapoktan selain itu juga dilakukan pembinaan peningkatan adopsi inovasi teknologi dan kelembagaan. Pada tahun pertama dana dikelola oleh Gapoktan melalui Usaha Simpan Pinjam (USP) dan selanjutnya diharapkan dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM A) dengan syarat dananya dapat berkembang sebanyak 15 persen. Kegiatan ini dilaksanakan tahun 2010 dan berlokasi di Propinsi Sumatera Barat. Tujuan kajian: (a) mengetahui perkembangan jumlah LKM-A, (b) mengetahui cara pengelolaan bantuan modal BLM PUAP di tingkat Gapoktan, dan (c) mengetahui keragaan adopsi teknologi. Hasil menunjukkan, bahwa Program PUAP di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 429 Gapoktan yang tersebar ke 15 kabupaten. Dari total 429 Gapoktan, sudah terbentuk 103 LKM-A atau 24 persen dari total Gapoktan. Pengelolaan modal oleh Gapoktan sudah sesuai petunjuk dan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus dan anggota Gapoktan. Selama ini, adopsi inovasi teknologi belum menunjukkan kemajuan sementara adopsi inovasi kelembagaan sudah cukup berhasil, terutama dalam mengelola modal. Untuk meningkatkan keberhasilan, program PUAP masih memerlukan beberapa perbaikan, terutama perbaikan Sumber Daya Manusia dan inovasi teknologi spesifik lokasi. Untuk itu, memerlukan dukungan dari berbagai Dinas/Instansi teknis terkait dan dukungan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kata kunci: LKM-A, adopsi inovasi, Sumatra Barat

ABSTRACT

In the low capital condition, the process of technology adoption by farmers will run less than optimal and there are some innovations that are wasted (idle). In 2008, Ministry of agriculture has been implementing the program of Rural Agribusiness Development (RAD) in Rural Area. Through the program RAD, the Farmers Groups Association (FGA) was given the capital grand as much as 100 million per FGA. This studi was conducted in 2010 and located in West Sumatera. Research objectives are (a) to know the development of the Micro Credit Institution for Agribusiness (MCI-A), (b) to know the management of capital grand in the FGD, and (c) to know the performance of teknologi adoption. Result showed, that the program of Rural Agribusiness Development (RAD) in in West Sumatera have reached 429 of Farmers Groups Association, distributed in 15 Districts, and resulted 103 of Micro Credit Institution for Agribusiness or 24 percents of total. The management of Capital by FGA was appropriate and decided by the results of discussions between officials and members of FGA. During this time, the adoption of potatos technology has not shown progress while the adoption of institutional innovation has been quite successfully, especially in managing capital. The RAD program still needs some improvement, particularly improvement of human resources and site-specific technological innovations. For that, need support from various technical offices/agencies and policy support both central and local government.

Key words: LKM-A, innovation adoption, West Sumatra

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian menghadapi banyak permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah ketersediaan sumber pembiayaan yang murah dan mudah diakses oleh petani di pedesaan dengan tepat waktu. Lembaga permodalan merupakan lembaga pendukung agribisnis yang penting untuk kegiatan usahatani mengingat kelemahan utama petani saat ini adalah kurang kuat dalam permodalan. Selama ini, lembaga kredit formal (komersial) yang menyediakan bunga rendah hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, seperti pemilik penggilingan padi (*Rice Milling Unit*), pedagang input produksi dan pelaku bisnis lainnya (Irawan, 1989; Supadi *dkk.*, 2004; dan Supriatna, 2008). Sebagian mereka merupakan pelaku lembaga kredit informal, mengalokasikan dana pinjamannya untuk dipinjamkan kembali ke petani-petani gurem dengan bunga tinggi.

Kredit sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan usahatani dan ekonomi usahatani. Untuk memproduksi lebih banyak, para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk bibit unggul, obat-obatan, pupuk dan alat. Dalam kondisi seperti ini, proses adopsi inovasi teknologi berjalan kurang optimal. Sehingga sering terjadi beberapa teknologi

yang terbuang percuma (*idle technologies*).

Mengingat permasalahan tersebut, kementerian pertanian mulai tahun 2008 melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Melalui program PUAP, diberikan bantuan modal usaha berupa Bantuan Langsung Mandiri (BLM) sebesar Rp.100 juta per Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Program ini merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani, baik petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan dan disalurkan melalui Gapoktan. Pada tahun pertama, Gapoktan melalui unit usahanya (pengelolaan kredit) dana bantuan dikelola melalui Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) selanjutnya diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani dalam wadah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Peryaratan untuk menjadi LKM-A yaitu unit pengelolaan kredit mampu berjalan lancar yang terlihat dari bertambahnya total dana BLM PUAP minimal 15 persen (dari Rp.100 juta menjadi Rp.115 juta), baik dalam bentuk tunai maupun bentuk asset lainnya yang dimiliki Gapoktan.

Sampai dengan tahun 2010, jumlah Gapoktan yang telah mendapatkan bantuan modal usaha mencapai 29.013 Gapoktan, tersebar di 427 kabupaten/kota di 33 propinsi. Salah satu lokasi Gapoktan

penerima dan BLM PUAP adalah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dengan inovasi yang diintroduksi agribisnis komoditas kentang, meliputi inovasi kelembagaan dan inovasi teknologi. Bimbingan kelembagaan terutama penguatan kelembagaan Gapoktan dan pengelolaan permodalan melalui tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) dan bimbingan teknologi terutama penerapan inovasi teknologi melalui tenaga Penyuluh Pendamping (PP) mulai dari teknologi budidaya (*on farm*), pengolahan dan pemasaran hasil kentang.

Pengembangan komoditas sayuran lebih sulit dibandingkan tanaman pangan lainnya dikarenakan komoditas sayuran bersifat mudah busuk sehingga kelancaran pemasaran sangat menentukan. Keberpihakan pemerintah dalam penanganan komoditas sayuran terutama dukungan pemasaran, sarana dan prasarana sangat diperlukan mengingat karakteristik produk-produk hortikultura yang mudah rusak (Tamba, 2007).

Masalah pengembangan agribisnis hortikultura pada umumnya lebih terletak pada aspek di luar usahatani (*off-farm*) dari pada aspek usahatani (*on-farm*) karena kendala pengembangan agribisnis hortikultura lebih banyak dijumpai pada aspek penanganan pasca panen dan pemasaran (Irawan, 2007). Karakteristik yang melekat pada produk sayuran dan

buah-buahan adalah produk tersebut umumnya bersifat mudah membusuk dan sulit diangkut dalam jarak jauh dengan tanpa menimbulkan kerusakan dan susut yang besar. Dengan demikian menuntut penanganan yang cepat dan tepat di semua tingkatan tataniaga (Rachman, 1997). Disamping itu, sering terjadi fluktuasi harga jual yang tinggi, harga rendah terjadi pada waktu musim panen raya sedangkan harga tinggi terjadi pada waktu paceklik yaitu pada awal dan akhir musim panen (Iswariyadi *et al.*, 1993).

Keberhasilan pengembangan usaha agribisnis di suatu daerah tidaklah mudah, akan menemukan berbagai permasalahan atau kendala baik berasal dari intern maupun ekstern petani yang tergabung dalam Gapoktan serta kinerja persiapan dan pembinaan oleh pihak terkait baik di pusat maupun daerah. Dari sisi *outcome*, keberhasilan PUAP dapat dilihat meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan bantuan modal usaha, meningkatnya aktivitas agribisnis, dan meningkatnya pendapatan petani (Sarwani, 2011).

Kajian ini ditujukan pada Gapoktan PUAP yang mendapat bantuan dana BLM tahun 2008 dan 2009. Secara rinci tujuan pengkajian adalah: (a) mengetahui perkembangan jumlah LKM-A, (b) mengetahui cara pengelolaan bantuan modal BLM-PUAP di tingkat Gapoktan,

dan (c) mengetahui keragaan adopsi inovasi teknologi. Hasil kajian diharapkan memberikan masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program PUAP.

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini dilaksanakan tahun 2011 di Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya terpilih Kabupaten Solok sebagai lokasi studi yang merupakan sentra produksi sayuran Sumbar. Selanjutnya dipilih 3 Gapoktan contoh secara acak, terdiri atas: (a) Gapoktan non PUAP (belum mendapatkan BLM-PUAP), (b) Gapoktan PUAP Murni (hanya mendapat program PUAP), dan (c) Gapoktan PUAP Plus (pernah mendapatkan program lain disamping program PUAP) seperti Pengembangan Kawasan Hortikultura, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), Pemberdayaan Petani Melalui Inovasi Teknologi Pertanian (FEATI) dan lainnya.

Kajian menggunakan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (*focus groups discussion* – FGD). Setiap kelompok beranggotakan 10 – 20 orang terdiri atas pengurus Gapoktan, Poktan dan beberapa petani anggota. Data sekunder terdiri dari informasi umum PUAP, keragaan Gapoktan dan LKM-A serta informasi lain yang relevan dikumpulkan dari BPTP

Sumbar, Penyuluh Pendamping, PMT dan laporan Gapoktan. Pengkajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis statistik sederhana (Malian, 2004)

a. Pendapatan usahatani

$$\pi = Y \cdot P_y - \sum_{i=1}^n X_i \cdot P_{x_i} - BL$$

Dimana:

π = Pendapatan bersih usahatani (Rp/ha/musim)

Y = Total produksi (Kg/ha/musim)

P_y = Harga jual mangga (Rp/kg)

X_i = Tingkat penggunaan input usahatani ke-i (Rp/ha/musim)

P_{x_i} = Harga input usahatani ke-i (Rp/kg)

BL = Biaya lainnya (Rp/ha/musim)

b. Kelayakan usahatani (B C Ratio)

$$B C \text{ Ratio} = \frac{(RACV)}{TVC}$$

Dimana:

B C Ratio = Nisbah pendapatan terhadap biaya

Y = Total produksi (kg/ha/th)

P = Harga jual (rp/kg)

TVC = Nilai biaya total (rp/ha/tahun)

Dengan keputusan:

BC Ratio > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan

BC Ratio = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas (BEP)

BC Ratio < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan (rugi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan jumlah LKM-A

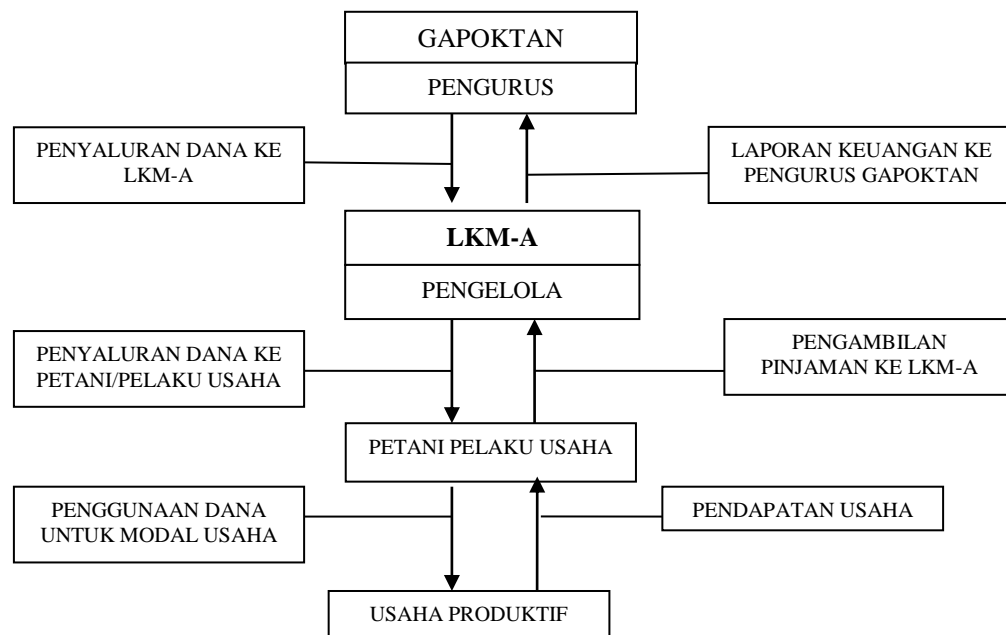
Untuk menunjang kelancaran program, tim pembina Provinsi Sumbar sudah merumuskan persyaratan sistem pengelolaan dana BLM PUAP, yaitu: (a) dana PUAP harus digulirkan dan tidak boleh gagal; (b) LKM-A sebagai pengelola dana PUAP dibentuk oleh Gapoktan; (c) sistem pengelolaan dana dapat secara konvensional atau syariah sesuai kesepakatan anggota Gapoktan; (d) menyediakan Juknis Pelaksanaan PUAP dan (e) disediakannya dukungan Pemda Kabupaten untuk memfasilitasi kegiatan LKM-A dan Gapoktan melalui dana pendampingan. Pada kenyataannya, pengelolaan dana mayoritas Gapoktan menggunakan sistem konvensional hanya istilah bunga diganti dengan istilah jasa.

BPTP Sumbar (2011) menerangkan, bahwa strategi yang dilakukan oleh tim pembina Provinsi Sumbar dalam upaya penumbuhan dan keberlanjutan LKM-A meliputi *Strategi pertumbuhan* terdiri atas sosialisasi kebijakan pengelolaan dana oleh LKM-A kepada Tim Teknis dan para Penyelia Mitra Tani (PMT), sosialisasi/apresiasi kepada pengurus Gapoktan agar membentuk LKM-A dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar dan tim Pembina provinsi dan kabupaten, kunjungan ke LKM-A yang sudah

ada/terbentuk, sosialisasi TVRI daerah, (e) motivasi keinginan Gapoktan diteruskan kepada anggota, dan penegasan Gubernur berupa surat kepada para Bupati tentang Gapoktan PUAP agar membentuk LKM-A untuk mengelola dana PUAP. *Strategi keberlanjutan* terdiri atas penggunaan dana lebih diprioritaskan untuk usaha produktif dan penerimaan jangka pendek seperti pengolahan, pemasaran dll, pada tahap awal struktur organisasi USP (terdiri atas manager, kasir dan seksi administrasi pembukuan. Selanjutnya struktur LKM-A menjadi lebih disempunakan ditambah seksi penggalangan dana dan seksi pembayaran, dan menghimpun dana awal anggota agar dapat dipinjam lebih dahulu untuk dipergunakan sebagai biaya operasional/administrasi LKM-A.

Hubungan LKM-A dengan Gapoktan pada program PUAP yaitu, pengelola LKM-A berada di bawah Gapoktan, dana BLM PUAP diberikan oleh pengurus Gapoktan ke LKM-A untuk dikelola dan disalurkan ke petani/pelaku usaha. Dana digunakan oleh petani untuk tambahan modal usaha produktif. Selanjutnya petani mengembalikan pinjaman beserta bunganya ke pengelola LKM-A (Gambar 1).

Pelaksanaan bantuan dana BLM-PUAP di Provinsi Sumbar dimulai pada tahun 2008 dan 2009 yang realisasi pencairan dananya dilaksanakan antara 6



Gambar 1. Hubungan LKM-A dengan Gapoktan pada Program PUAP di Sumbar

Tabel 1. Jumlah Desa PUAP dan LKM-A menurut Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat per Mei 2011.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PUAP (Th.2008 dan 2009)	Jumlah LKM-A (Nilai asset > Rp.115 juta)	Prosentase LKM-A
1	Agam	29	10	34,5
2	Dharmasraya	33	3	9,1
3	Kota Padang	7	1	14,3
4	Payakumbuh	5	5	100,0
5	Kota Pariaman	9	9	100,0
6	Lima Puluh Kota	34	10	29,4
7	Kepulauan Mentawai	15	0	0,0
8	Padang Pariaman	42	10	23,8
9	Pasaman	27	6	22,2
10	Pasaman Barat	25	3	12,0
11	Pesisir Selatan	62	8	12,9
12	Sijunjung	47	10	21,3
13	Solok *	33	8	24,3
14	Solok Selatan	33	12	36,4
15	Tanah Datar	28	8	28,6
Jumlah		429	103	24,0

Keterangan: Sumber = BTP Sumbar, 2011; *) = Kabupaten Lokasi studi

sampai 12 bulan kemudian. Sampai saat ini, keseluruhan mencapai 429 desa PUAP dan terdistribusi pada 15 kabupaten. Tiga lokasi PUAP terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan 62 Desa

(14,4%), Sijunjung 47 Desa (10,9%), Padang Pariaman 42 desa (9,8%), dan Solok 33 desa (7,8%) sisanya tersebar di sebelas kabupaten lainnya. Dari total 429 PUAP, sudah terbentuk 103 LKM-A dan

di Kabupaten Solok sendiri sudah terbentuk 8 LKM-A atau 24,3 persen dari total 33 PUAP (Tabel 1).

Gapoktan yang berhasil membentuk LKM-A yaitu Gapoktan yang nilai asetnya sudah berkembang atau bertambah 15 persen dari modal awal PUAP (Rp.100 juta). Sementara Gapoktan yang belum berhasil membentuk LKM-A umumnya merupakan Gapoktan yang baru berjalan (bantuan BLM terealisasi tahun 2010), atau menghadapi permasalahan, baik berasal dari intern maupun ekstern Gapoktan. Sehingga modal usaha BLM PUAP yang dijalankan belum mencapai kenaikan diatas 15 persen atau bahkan mengalami kemacetan.

Hasil identifikasi menunjukkan, bahwa kemacetan bisa terjadi dikarenakan kinerja pengurus yang kurang baik dan persepsi petani yang salah bahwa bantuan modal BLM PUAP merupakan bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Sesuai pendapat Hastuti (2004) dan Nurmanaf (2007) bahwa selama ini masih adanya pandangan pihak-pihak tertentu, bahwa kredit program merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Pandangan seperti ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tunggakan kredit

Zalimi *dkk.* (2011) menginformasikan, bahwa permasalahan dalam pengembangan LKM-A di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berasal dari

faktor internal dan eksternal Gapoktan. Faktor internal meliputi pelanggaran dalam pengembalian pinjaman tidak tepat waktu, bahkan ada yang belum mengembalikan sama sekali karena petani beranggapan bahwa BLM PUAP identik dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak dikembalikan; dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BLM PUAP. (b) faktor eksternal meliputi aksesibilitas wilayah kerja PMT dan Penyuluh pendamping (PP) relative rendah dan tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah Gapoktan; dan koordinasi antar petugas di lapangan masih relatif lemah dan terlihat kurang sinergis antara Tenaga Penyuluh Pertanian (PP) dan petugas PMT.

Model pengelolaan LKM-A di Sumatera Barat ada dua bentuk: (a) cara konvensional yaitu memakai jasa bunga yang diterapkan oleh mayoritas (90%) LKM-A dan (b) sisanya cara syariah memakai sistem bagi hasil (10%) LKM-A (BPTP Sumbar, 2011). Biaya operasional LKM-A terdiri dari biaya administrasi (ATK), honor pengelola, dan biaya lainnya. Semua biaya pengeluaran didapat dari biaya administrasi yang ditanggung peminjam mengadopsi aturan kredit motor atau mobil. Profil LKM-A yang berkembang di Sumbar, yaitu: a. Organisasi: manejer, kasir, dan pembukuan atau manejer, kasir, seksi

pembiayaan, seksi pembukuan dan seksi penggalangan dana dan SDM, c. Ruang dan perangkat administrasi meliputi ATK, mesin itik, atau komputer, dll serta . melakukan penggalangan dana melalui sosialisasi ke kelompok tani (Poktan), warga yang merantau dan pihak lainnya, d. Menghimpun dana awal (15%) melalui iuran pokok sebanyak Rp 10.000 sampai Rp.50.000/anggota, iuran wajib Rp.1.000 sampai Rp.5.000/bulan/anggota dan anggota punya buku tabungan. Anggota/pendiri diarahkan untuk mempunyai simpanan khusus di LKM-A untuk meningkatkan rasa memiliki, e. Rapat anggota dilakukan secara berkala, jumlah anggota LKM-A antara 100 sampai 500 orang; Penyertaan dana PUAP Rp.100 juta di pindahkan/transfer dari Gapoktan ke LKM-A. Administrasi keuangan telah memiliki buku jurnal, buku besar, kartu pembantu (sebanyak jenis usaha) dan rekening LKM-A di Bank, f. Penyaluran dana PUAP ke petani dengan syarat merupakan anggota Gapoktan, rencana Usaha Anggota (RUA), permohonan pinjaman, surat pengakuan hutang/PK, kuitansi. Jangka waktu pinjaman untuk usahatani pangan dan hortikultura 3-6 bulan, perkebunan 6-12 bulan, ternak 6-12 bulan, off-farm 3-6 bulan, dan g. Bunga pinjaman 1-2% per bulan (konvensional) atau bagi hasil. Kewajiban peminjam berupa biaya administrasi rata-

rata Rp.5.000 sampai Rp.20.000 dan Provisi 0-1%. Pengembalian bisa secara harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan atau yarnen.

Cara Pengelolaan Bantuan Modal BLM-PUAP

Sebelum mendapatkan bantuan dana BLM PUAP, baik Gapoktan PUAP Murni maupun PUAP Plus merupakan Gapoktan yang sudah terbentuk, didirikan dan dikukuhkan bupati pada tahun 2007. Sementara Gapoktan Non PUAP baru berdiri tahun 2010 yang merencanakan untuk mendapatkan bantuan dana tahun 2011. Gapoktan PUAP Plus sudah pernah mendapatkan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura dan FEATI tahun 2009, meliputi kegiatan pengembangan/pelatihan tanaman organik dan pelatihan pembibitan serta pengolahan kripik kentang .

Dalam pengelolaan bantuan modal usaha bersama, pada garis besarnya sudah sesuai arahan dari tim pembina provinsi dan kabupaten, sementara aspek lainnya seperti besar pinjaman, lama pinjaman, cara pengembalian dan lainnya ditepakan berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan anggota Gapoktan. Dengan demikian terjadi sedikit perbedaan pengelolaan dana antara satu Gapoktan dengan lainnya tergantung hasil kesepakatan bersama (Tabel 2).

Mekanisme meminjam. Prosedur

pengajuan LKM-A mengadopsi cara yang sudah biasa dipakai Gapoktan sehingga tidak ada perbedaan utama. Petani membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) selanjutnya digabung pada kelompok menjadi Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan diajukan ke ketua Gapoktan menjadi Rencana Usaha Bersama (RUB). Pengurus Gapoktan melakukan verifikasi dan apabila disetujui maka diajukan ke LKM-A untuk dibayarkan oleh kasir LKM-A melalui kelompok. Mekanisme meminjam ini lebih sederhana dibandingkan prosedur lembaga kredit formal yang rumit dan membutuhkan waktu lama sehingga sulit diakses petani. Beberapa alasan petani memilih lembaga pembiayaan informal dibandingkan lembaga formal menurut Syafa'at *dkk.*(1993) dan Nurmanaf (2007) adalah prosedur pengajuan kredit sangat sederhana tidak seperti lembaga formal prosedurnya rumit (*rigid*) dan perolehan kredit lebih mudah, cepat dan jumlah kredit yang diterima sesuai dengan pengajuan.

Besar pinjaman. Menurut aturan besar pinjaman ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Selama ini, masing-masing anggota merasa mempunyai hak yang sama atas bantuan tersebut sehingga mereka tidak mempertimbangkan perbedaan luas lahan antara satu petani dengan lainnya. Besar kredit ditetapkan sama antara satu petani

dengan lainnya, yaitu Rp.1-2 juta/petani sayuran dan Rp.0,5 juta/petani itik. Jumlah ini masih kecil dibandingkan pinjaman petani non PUAP Rp.3-4 juta/petani sayuran apalagi kebutuhan modal ushatani kentang mencapai Rp.20,8-21 juta/ha/musim (Tabel 5). Untuk memenuhi kekurangan kredit, petani terpaksa harus meminjam ke lembaga lain yang mampu diakses.

Lama pinjaman dan cara pembayaran. Lama pinjaman dan cara pembayaran ditetapkan oleh hasil musyawarah anggota dengan mempertimbangkan umur panen tanaman. Lama pinjaman 4 sampai 12 bulan dengan cara pengembalian satu kali setelah panen dapat diterima petani umur panen kentang sekitar 3 bulan.

Jasa pinjaman. Gapoktan PUAP menetapkan jasa pinjaman 12 persen, PUAP Plus 24 persen sedangkan Non PUAP sebanyak 30 persen per tahun. Jasa pinjaman ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jasa pelepas uang yang mencapai 50 sampai 60 persen per tahun. Pada Gapoktan, penggunaan dana diawasi oleh pengurus Gapoktan melalui pertemuan rutin sekali sebulan. Kontrol penggunaan dana sangat penting supaya dana tidak digunakan untuk tujuan lain terutama yang bertujuan konsumtif. Berbeda dengan pinjaman dari lembaga lain baik BRI maupun pelepas uang yang

Tabel 2. Kinerja Pengelolaan Dana Bantuan Modal BLM-PUAP menurut Kelompok Gapoktan di Kabupaten Solok, Sumbar

No.	Uraian	Non PUAP (Gapoktan)	LKM-A PUAP Murni	LKM-A PUAP Plus
1.	Nama	Sejahtera bersama	Telaga Zamzam	Alam Gumanti
2.	Tahun berdiri Gapoktan	Tahun 2010	Tahun 2007	Tahun 2007
3.	Tahun Nerima dana	-	Tahun 2008	Tahun 2009
4.	Badan hukum	Belum	Tahun. 2009	Tahun 2009
5.	Jumlah anggota	60 Orang	280 Orang	120 Orang
6.	Modal awal (PUAP)	-	Rp.100 juta	Rp.100 juta
7.	Lokasi kantor	Kantor Gapoktan	Terpisah dari kantor Gapoktan	Masih bersama dengan Gapoktan
8.	Jenis dan jumlah Simpanan anggota	Simpanan wajib Rp.10.000/bln /anggota; Simpanan pokok Rp.50.000/anggota	Simpanan wajib Rp.1.000/bln /anggota; Simpanan pokok Rp.50.000/anggota	Simpanan wajib Rp.5.000/bln /anggota; Simpanan pokok Rp.50.000/anggota
9.	Mekanisme meminjam	Calon nasabah ke poktan, poktan ke gapoktan, Gapoktan dibayarkan oleh kasir Gapoktan lewat kelompok	Calon nasabah ke poktan, poktan ke gapoktan, Gapoktan ke LKM A dibayarkan oleh kasir LKM-A lewat kelompok	Calon nasabah ke poktan, poktan ke gapoktan, Gapoktan ke LKM A dibayarkan oleh kasir LKM-A lewat kelompok
10.	Besar pinjaman	Rp.3-4 juta/nasabah	Sayuran Rp.2 juta/nasabah Itik Rp.0,5 juta/nasabah	Rp.1 juta/nasabah
11.	Pemanfaatan dana	Modal usahatani Sayuran *	Modal usahatani sayuran, Ternak itik	Modal usahatani sayuran
12.	Lama pinjaman dan cara pembayaran	2 bulan;dibayar satu kali	12 bulan; dibayar bulanan	4 bulan dibayar satu kali
13.	Jasa pinjaman	30%/tahun	12%/tahun	24%/tahun
14.	Penunggak/kredit macet	Tidak ada	15 %; alasan kegagalan panen	Tidak ada
15.	Nilai aset yang dikelola (s/d Agustus 2011)	Rp.180 juta	Rp.115 juta	Rp.120 juta
16.	Jumlah anggota yang memanfaatkan	80 Orang	216 Orang	120 Orang
17.	Cara pemupukan modal	Iuran pokok, iuran wajib; keuntungan usaha bersama	Iuran pokok, iuran wajib; keuntungan usaha bersama	Iuran pokok, iuran wajib; keuntungan usaha bersama
18.	Program lain yang pernah masuk	Belum pernah-	Belum pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Demplot Kentang; bawang merah; SL.pengolahan dan pemasaran hasil • Pelatihan penangkaran kentang

Keterangan: *) = Jenis sayuran: Kentang, Bawang daun, Cabe, sawi dsb

tidak pernah melakukan pengawasan dalam penggunaan dana.

Cara pemupukan modal. Semua Gapoktan melaksanakan pemupukan modal usaha berasal dari simpanan pokok Rp.50.000/anggota, iuran wajib, jasa pinjaman dan hasil usaha bersama kelompok seperti pengadaan penjualan input produksi dan menyewakan alat pertanian. Gapoktan LKM-A Murni mempunyai modal Rp.115 juta (bertambah 15 persen) dan Gapoktan LKM-A Plus Rp.120 juta (bertambah 20 persen).

Jumlah anggota yang memanfaatkan bantuan dana. Baik dari Gapoktan PUAP murni maupun PUAP Plus, jumlah petani yang memanfaatkan tidak menunjukkan penambahan, bahkan PUAP Murni menunjukkan penurunan 22,8% (dari 280 menjadi 216 orang). Alasan penurunan dikarenakan mereka masih menunggak sehingga tidak diberipinjaman lagi sebelum melunasinya. Yang menunjukkan peningkatan jumlah nasabah adalah Gapoktan non PUAP meningkat 33% (dari 60 menjadi 80 orang).

Keragaan Adopsi Teknologi Kentang Gapoktan PUAP

Kabupaten Solok merupakan penghasil kentang terbesar di Sumbar, dari total produksi Provinsi Sumbar 28.820 ton tahun 2009, Kabupaten Solok memberikan kontribusi 25.083 ton atau sebanyak 87,0% (BPTP Sumbar, 2011).

Permasalahan pengembangan kentang di Sumbar adalah petani masih menggunakan benih kentang asalan (hasil panen sendiri), ukuran benih kecil dengan kualitas benih tidak diketahui. Benih tersebut mempunyai kelemahan antara lain mudah tertular penyakit, mengalami masa dormansi dan terjadi degradasi hasil. Strata benih sudah lebih dari G-10 yang daya produksinya hanya sekitar 15 ton/ha sementara benih yang dianjurkan merupakan strata G-4 yang memiliki potensi hasil 30 ton/ha.

Dampak benih bermutu terhadap peningkatan produksi dan kualitas produk akan terasa bila benih tersebut ditanam dalam skala luas, penanaman skala luas hanya dicapai bila sistem distribusi benih mampu menyalurkan varietas unggul kepada konsumen (petani) sehingga benih bermutu tersedia di tingkat petani (Nugraha dkk., 2004 dalam Supriatna dkk., 2010).

Mengingat permasalahan tersebut, beberapa komponen inovasi teknologi yang diintroduksi program PUAP meliputi: (a) penumbuhan penangkaran benih kentang supaya petani menggunakan benih bermutu (G 4); (b) teknologi konservasi lahan; (c) pemakaian pupuk organik (kompos); (d) pengendalian hama penyakit dengan metode PHT; dan (e) budidaya sayuran organik. Proses adopsi inovasi yang diintroduksi masih berjalan lambat, benih G4 dan pembuatan

Tabel 3. Keragaan Adopsi Inovasi Teknologi Kentang menurut Kelompok Gapoktan di Kabupaten Solok, Sumbar

No	Uraian	Adopsi Inovasi Teknologi	
		Sebelum PUAP	Sesudah PUAP
A. NON PUAP			
1.	Pola Tanam	Padi- Sayuran/Kentang	Padi-Sayuran/Kentang
2.	Varietas	Granola	Granola
3.	Kualitas Benih	Asalan	Asalan dan Kelas G4
4.	Pupuk Organik	Pupuk Kandang	Pupuk Kandang dan Kompos
5.	Pupuk An Organik	NPK, KCl, Urea dan SP-36	NPK, KCL, Urea, SP-36
6.	Produktivitas	10-16 ton/Ha	15-20 ton/ha
7.	Pasca Panen	Grading (Besar-Sedang-Kecil)	Grading (Besar-Sedang-Kecil)
8.	Penangkaran benih kentang	Sudah ada	Sudah ada
9.	Pengolahan hasil kentang	Belum ada	Belum ada
B. PUAP MURNI			
1.	Pola Tanam	Padi- Sayuran/Kentang	Padi-Sayuran/Kentang
2.	Varietas	Granola	Granola
3.	Kualitas Benih	Asalan	Asalan dan Kelas G4
4.	Pupuk Organik	Pupuk Kandang	Pupuk Kandang dan Kompos
5.	Pupuk An Organik	NPK, KCl, Urea dan ZA	NPK, KCL, Urea, SP-36
6.	Produktivitas	10-16 ton/Ha	15-20 ton/ha
7.	Pasca Panen	Grading (Besar-Sedang-Kecil)	Grading (Besar-Sedang-Kecil)
8.	Penangkaran benih kentang	Belum ada	Baru Introduksi
9.	Pengolahan hasil kentang	Belum ada	Baru Introduksi
C. PUAP PLUS			
1.	Pola Tanam	Padi- Sayuran/Kentang	Padi-Sayuran/Kentang
2.	Varietas	Granola	Granola
3.	Kualitas Benih	Asalan	Asalan dan Kelas G4
4.	Pupuk Organik	Pupuk Kandang	Pupuk Kandang dan Kompos
5.	Pupuk An Organik	NPK, KCl, Urea dan ZA	NPK, KCL, Urea, , SP-36
6.	Produktivitas	10-16 ton/Ha	15-20 ton/ha
7.	Pasca Panen	Grading (Besar-Sedang-Kecil)	Grading (Besar-Sedang-Kecil)
8.	Penangkaran benih kentang	Belum ada	Baru Introduksi
9.	Pengolahan hasil kentang	Belum ada	Baru Introduksi

kompos baru diadopsi oleh sebagian kecil petani sedangkan teknologi lainnya masih sulit diadopsi (Tabel 3).

Kendala petani untuk menjadi

penangkar benih kentang adalah sulit mendapatkan sumber bibit, harus mengambil ke Balitsa Lembang (Jawa Barat), jumlah sumber benih tersedia

masih kurang selain itu ada gangguan iklim (kekurangan air hujan). Untuk menghasilkan sayuran organik, permasalahan petani adalah banyaknya gangguan OPT pada tanaman sayuran perlu penggunaan pestisida (Tabel 4).

Untuk dapat akses ke lembaga pemasaran modern seperti swalayan atau eksportir, petani sayuran mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan permintaan pasar modern terutama persyaratan kontinuitas jumlah pengiriman barang, persyaratan kualitas barang dan rumitnya cara pembayaran yang diterapkan (Agustian, 2005). Program BLM PUAP selama ini belum sampai menunjukkan perbedaan besar dalam mengadopsi inovasi teknologi tetapi baru terlihat pada aspek inovasi kelembagaan,

terutama dalam mengelola keuangan bantuan BLM PUAP.

Dalam kegiatan usahatani kentang, petani non Puap mencurahkan biaya sebanyak Rp.20,8 juta/ha/musim paling banyak dialokasikan untuk biaya sarana produksi 72,2 persen, tenaga kerja 27,1 persen dan biaya lain 0,6 persen. Nilai produksi mencapai Rp.46,5 juta/ha/musim, nilai pendapatan Rp.25,7 juta/ha/musim dengan nilai RC rasio 2,23. Petani PUAP mencurahkan biaya lebih besar, yaitu Rp.21,0 juta/ha/musim, tetapi tambahan biaya dapat diimbangi dengan peningkatan nilai produksi mencapai Rp.51 juta/ha/musim, pendapatan Rp.29,9 juta/ha/musim dengan nilai RC rasio 2,43 (Tabel 5).

Tabel 4. Kendala Petani Dalam Mengadopsi Inovasi Teknologi Kentang di Kabupaten Solok, Sumbar

No	Inovasi Teknologi	Kendala
1.	Penangkaran benih kentang	<ul style="list-style-type: none">• Sulit memesan sumber bibit, jauh harus dari Lembang, Jabar
2.	Kentang/sayuran Organik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah sumber bibit yang dapat dipesan terbatas• Banyak gangguan OPT yang harus dikendalikan dengan pestisida
3.	Pupuk Organik Kompos	<ul style="list-style-type: none">• Kesulitan pemasaran hasil• Kesulitan pembuatan kompos dan lebih praktis langsung diberikan dalam bentuk pupuk kandang
4.	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none">• Kesulitan memenuhi persyaratan kontinuitas pengiriman• Prosedur birokrasi pengiriman barang sulit
5.	Pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kesulitan pemasaran, bersaing dengan industri pengolahan hasil yang sudah eksis (lebih modern)

Tabel 5. Analisis Usahatani Kentang menurut Kelompok Petani di Kabupaten Solok, Sumbar (Satuan/ha/musim)

No	Masukan/Pengeluaran	Petani Non PUAP		Petani PUAP	
		Fisik	Nilai (Rp)	Fisik	Nilai (Rp)
A.	Sarana produksi				
	1. Bibit	1.300	7.800.000	1.200	8.400.000
	2. Pupuk UREA	250	500.000	150	300.000
	TSP/SP36	500	1.150.000	400	920.000
	KCL	200	600.000	200	600.000
	NPK	75	187.500	50	125.000
	Pupuk Kandang	18.000	2.700.000	20.000	3.000.000
	Lain-Lain	3.000	600.000	3.000	600.000
	3. Obat-Obatan	-	1.500.000	-	1.300.000
	Total (A):		15.037.500 (72,2%) ¹⁾	-	15.245.000 (72,5%)
B.	Tenaga Kerja				
	1. Persiapan Lahan	-	1.600.000	-	1.600.000
	2. Tanam	-	1.200.000	-	1.200.000
	3. Pemeliharaan	-	1.350.000	-	1.350.000
	4. Panen	-	1.500.000	-	1.500.000
	Total (B):	-	5.650.000 (27,1%)	-	5.650.000 (26,9%)
C.	Biaya lainnya; ²⁾	-	135.000 (0,6%)	-	135.000 (0,6%)
	Total biaya (A+B+C):		20.822.500		21.030.000
D.	Produksi	15.500	46.500.000	17.000	51.000.000
	Pendapatan		25.677.500		29.970.000
	RC Rasio		2,23		2,43

Keterangan: ¹⁾ = Angka dalam kurung menyatakan prosentase terhadap total biaya; ²⁾ = Biaya lain meliputi nilai pajak, iuran kelompok tani, dll.

Peningkatan produksi petani PUAP paling besar dikarenakan penggunaan bibit kentang kelas G 4 dibandingkan petani non PUAP benih asalan, selanjutnya terjadi penghematan pupuk organik dan penambahan pupuk organik. Selain itu penggunaan benih G4 lebih tahan terhadap gangguan hama penyakit sehingga dapat menghemat biaya pengendalian.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program PUAP di Provinsi

Sumatera Barat yang dimulai tahun 2008 dan 2009 sudah mulai menunjukkan kemajuan, dari total 429 desa PUAP sudah terbentuk 103 LKM-A atau 24 persen, pengelolaan bantuan modal usaha bersama sudah sesuai arahan tim pembina dan ditepakan berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan anggota Gapoktan. Selama ini, belum menunjukkan perubahan besar dalam mengadopsi inovasi teknologi tetapi baru terlihat pada aspek adopsi

inovasi kelembagaan, terutama dalam mengelola keuangan bantuan BLM PUAP.

2. Permasalahan dalam pengembangan LKM-A di Provinsi Sumatera Barat adalah petani beranggapan bahwa BLM PUAP identik dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak dikembalikan sehingga ditemukan petani yang menunggak, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BLM PUAP. aksesibilitas wilayah kerja PMT dan Penyuluh pendamping (PP) relative rendah dan kurang sinergis hubungan antara Tenaga Penyuluh Pertanian (PP) dan petugas PMT.
3. Program BLM PUAP merupakan terobosan Kementerian Pertanian untuk menjembatani kelemahan modal petani dan upaya meningkatkan aksesibilitas petani terhadap inovasi teknologi. Untuk meningkatkan kinerja Gapoktan PUAP diperlukan beberapa perbaikan terutama aspek SDM pengurus dan pemilihan inovasi teknologi spesifik lokasi yang dapat diterapkan dan menguntungkan. Untuk itu diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi teknis dan dukungan kebijakan pemerintah, baik baik pusat maupun daerah dalam aspek pengelolaan kredit maupun pembinaan usaha yang dijalankan oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A., Armen, Z. Syahyuti, A. Supriatna, H. Tarigan, Y. Supriatna. dan T. Nurasa. 2005. *Laporan Kajian: Analisis berbagai bentuk kelembagaan pemasaran dan dampaknya terhadap kinerja usaha komoditas sayuran dan buah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 75p.
- Azmi, D., R. Hendayana, Darman, M. Arsyad, H. Hermawan dan N. Alam. 2011. *Laporan Kajian: Akselerasi adopsi inovasi dan perkembangan LKM-A pada gapoktan PUAP di Sulawesi Tenggara*. Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 42p.
- BPTP Sumbar. 2011. *Laporan Kajian: Pelaksanaan program PUAP di Provinsi Sumatera Barat*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 45p
- Hastuti, dan L. Endang. 2004. Aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pembiayaan pertanian di pedesaan. *ICASERD Working Paper No.57*. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Penelitian. Departemen Pertanian. 14p.
- Handewi, R. 1997. Aspek permintaan, penawaran dan tataniaga hortikultura di Indonesia. *Forum Penelitian Agroekonomi*. XV(1):1-16
- Irawan, B. 1989. Pelayanan kredit informal di pedesaan Sulawesi Selatan. *Jurnal Agro Ekonomi*. 8(2):23-45.
- _____. 2007. Fluktuasi harga, transmisi harga dan margin pemasaran sayuran dan buah. *Analisis Kebijakan Pertanian*. V(4):358-373
- Iswariyadi A., Supriati, V.T. Manurung., M. Rachmat dan A. Djauhari. 1993.

- Penelitian agribisnis. Buku V: Mangga. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Balai Litbang Pertanian. hlm.3-31
- Malian, A.H. 2004. Analisis ekonomi usahatani dan kelayakan finansial teknologi pada skala pengkajian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif (*The Participating Development of Technology Transfer Project (PAATP)*). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 28 hlm.
- Mariati. T. 2007. Ringkasan disertasi. Kebutuhan informasi pertanian dan aksesnya bagi petani sayuran. Pengembangan model penyediaan informasi pertanian dalam pemberdayaan petani. Kasus di Provinsi Jawa Barat. Sekolah Pasca Sarjana. IPB Bogor. 65 p.
- Muhrizal, S. 2011. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 41p.
- Nizwar, S dan A. Djauhari. 1992. Identifikasi penyebab rendahnya penyaluran kredit usaha tani. *Jurnal Agro Ekonomi*. 9(2):113-119.
- Nurmanaf, A.R. 2007. Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(2):99-109.
- Supadi dan M. Syukur. 2004. Aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan (Kasus petani padi sawah dan hortikultura di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat). *ICASERD Working Paper No.48*. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. 22p.
- Supriatna, A. 2008. Aksesibilitas petani kecil pada sumber kredit pertanian di tingkat desa: Studi kasus petani padi di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosio-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 8(2):134-139.
- Supriatna, A dan A. Dhalimi. 2010. Prospek pengembangan model industri perbenihan padi rakyat dari sisi kelayakan usaha. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (JPPT)*. 13(1): 29-41.